

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP
TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK DIMODERASI
TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN
(Study Pada WPOP Kantor DPRD Prov. Sulawesi Selatan)**

SKRIPSI



Oleh

RISMA

NIM 105730537215

**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP
TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK DIMODERASI
TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN
(Study Pada WPOP Kantor DPRD Prov. Sulawesi Selatan)**

SKRIPSI

Oleh
RISMA

NIM 105730537215

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

Program Studi Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada pohon perjuangan yang berbuah kesia-siaan”

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Al-Mujadalah : 11)

Skrripsi ini Kupersembahkan untuk keluargaku, ibu dan ayah serta kakakku yang selalu memberikan motivasi dan doa tanpa hentinya. tanpa keluarga, manusia sendiri di dunia, gemeter dalam dingin.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Dimoderasi Teknologi Informasi Perpajakan (Study Pada WPOP Kantor DPRD Prov. Sul-Sel)
Nama Mahasiswa : Risma
No. Stambuk / NIM : 105730537215
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Asriati, SE.,M.Si
NIDN : 0031126303


Mira SE.,M.Ak.AK
NIDN : 0903038803

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP.
NBM: 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Risma, **NIM** : 105730537215, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 145 / Tahun 1441 H / 2019 M, Tanggal 30 Dzulhijjah 1441 H / 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1441 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si. Ak.Ca (.....)
2. Chairul Ichsan, SE., M.Ak (.....)
3. Sitti Zuleha, S.Pd., M.Si (.....)
4. Dr. Edi Jusriadi, SE., MM (.....)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma

Stambuk : 105730537215

Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul : "Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Dimoderasi Teknologi Informasi Perpajakan (Study Pada WPOP Kantor DPRD Prov.Sulsel)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Risma

Diketahui Oleh:

Dekan



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 998078

Ketua Program Studi,

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., CSP
NBM : 1078428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Dimoderasi Teknologi Informasi Perpajakan (Study WPOP Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan)”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Kardi dan ibu Nur Ema yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang semantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang mereka telah berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rosulong, SE., MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi., SE., M.Si., Ak., CA., CSP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Asriati, SE., MSi selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Mira, SE., M.Ak. Ak selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu , kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabuqul Khairat, Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Makassar, September 2019

Penulis

RISMA



ABSTRAK

Risma (2019) “Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Dimoderasi Teknologi Informasi Perpajakan (Study Pada WPOP Kantor DPRD Prov. Sulawesi Selatan)” Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I ibu Asriati dan Pembimbing II ibu Mira.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Self assessment system* terhadap tindakan penggelapan pajak dimoderasi teknologi informasi pada WPOP Kantor DPRD Prov. Sulawesi Selatan. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kantor DPRD Prov Sulse, sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *Convenience sampling*. Data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, teknologi informasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak sedangkan hasil uji *self assessment system* dimoderasi teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

Kata Kunci: **Self Assessment System, Teknologi Informasi Perpajakan, Penggelapan Pajak**

ABSTRACT

Risma (2019) "The effect of self assessment system on tax evasion acts is moderated by taxation information technology (WPOP study provincial DPRD office, South Sulawesi Selatan)" thesis accounting study program at the Faculty of Economics and Business, Muhamadiyah University, Makassar. Mentored by mentors 1. Asriati and supervisor 2 Mira. This study aims to determine the effect of the system's self assessment system of acts of tax evasion moderated by information technology at the WPOP office of the south Sulawesi provincial parliament. The population of this study is all taxpayers of the south Sulawesi provincial DPRD office, the sample in is study was determined by the convenience sampling method. The data was collected by distributing questionnaires. The analytical method used was multiple linear regression. Based on the results of the study showed that the self assessment system partially significantly affected tax evasion, taxation information technology partially significantly affected tax evasion while the result of the self assessment system test moderated by tax information technology did not significantly influence tax evasion.

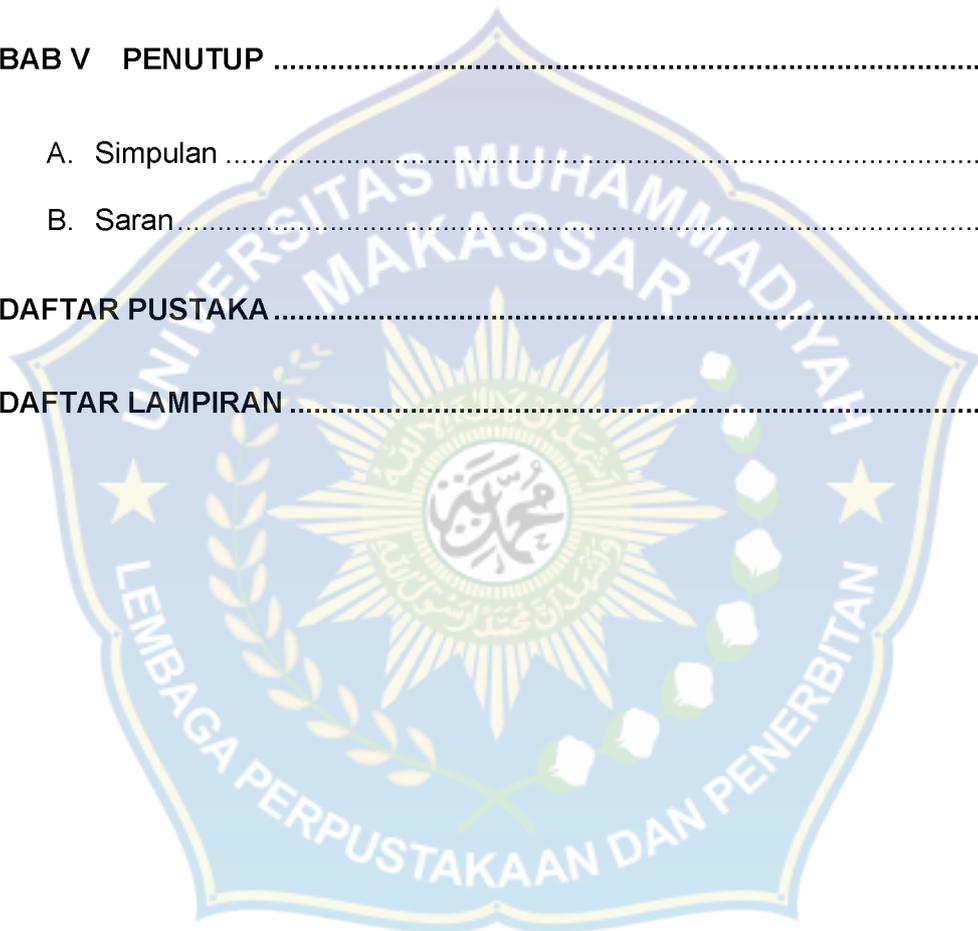
Keywords : self assessment system, taxation information technology, tax evasion.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	6
A.	Tinjauan Teori	6
1.	<i>Theory Of Planned Behaviour</i>	6
2.	Pajak.....	8
3.	<i>Self Assessment System</i>	11
4.	Teknologi Informasi.....	13
5.	Penggelapan Pajak.....	16
B.	Tinjauan Empiris	19
C.	Kerangka Konsep	22
D.	Hipotesis	23
BAB III	METODE PENELITIAN	25
A.	Jenis Penelitian.....	25
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C.	Definisi Operasional Variabel	25
1.	<i>Self Assessment System</i>	26
2.	Teknologi Informasi Perpajakan.....	27
3.	Penggelapan Pajak.....	27
4.	Populasi dan Sampel.....	28
5.	Teknik Pengumpulan Data	29
6.	Teknik Analisis	30
1.	Statistik Deskriptif	30
2.	Regresi Linier Berganda.....	30
3.	Uji Kualitas Data	31
4.	Uji Asumsi Klasik	32
5.	Uji Hipotesis	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran umum kantor DPRD Prov.Sulsel	36
B. Objek Penelitian	39
C. Hasil Analisis	42
D. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Tingkat pengembalian kuesioner	40
Tabel 4.2 Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin	40
Tabel 4.3 Deskripsi responden berdasarkan umur.....	41
Tabel 4.4 Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir	41
Tabel 4.5 Statistik deskriptif	42
Tabel 4.6 Hasil uji regresi linier berganda.....	43
Tabel 4.7 Hasil uji validitas <i>self assessment system</i>	44
Tabel 4.8 Hasil uji validitas teknologi informasi perpajakan	45
Tabel 4.9 Hasil uji validitas penggelapan pajak.....	45
Tabel 4.10 Hasil uji reliabilitas.....	46
Tabel 4.11 Non parametric one sample kolmogrove smirnov	48
Tabel 4.12 Hasil uji multikolinearitas.....	49
Tabel 4.13 Hasil uji koefisien determinasi.....	51
Tabel 4.14 Hasil uji F.....	52
Tebel 4.15 Hasil uji T	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	23
Gambar 4.1 Hasil uji normalitas	47
Gambar 4.3 Hasil uji heteroskedastisitas.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia saat ini mengalami peningkatan utang luar negeri yang cukup tinggi. Hal ini terdapat dalam keterangan resmi Bank Indonesia (BI), posisi ULN meningkat US 17,7 miliar. Untuk itu Negara Indonesia dituntut agar mampu memaksimalkan sumber pendapatan negara. Serta mewujudkan kemandirian ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk menopang biaya pembangunan maupun pengeluaran rutin setiap tahunnya. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber pendapatan Negara. Salah satu sumber berasal dari sektor perpajakan, dimana pajak diandalkan menjadi komponen terbesar atas pendapatan negara (Fitriyanti, 2017).

Tahun 1983 terjadi reformasi perpajakan dimana sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang menuntut para wajib pajak berperan aktif dan bertanggungjawab penuh atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, dimulai dari pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, melaporkan besaran pajak terutang dalam jangka waktu tertentu yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Pemerintah melalui aparatur perpajakan berperan sebagai pembina serta pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Upaya Dirjen pajak selain melakukan reformasi perpajakan yaitu

dengan menyediakan pemanfaatan kemajuan teknologi seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration*. Semua program layanan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya (Friskianti, 201). Hal serupa juga dijelaskan dalam penelitian Damayanti (2017), dan Purwanto (2018).

Konsekuensi logis dari *Self Assessment System*, yaitu pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggungjawab serta dengan menegakkan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan wajib pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional (setiawan dan muliari 2011).

Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban pajaknya akan memicu timbulnya berbagai masalah perpajakan, sebab dengan penerapan *Self Assessment System*, wajib pajak memiliki kesempatan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang atau bahkan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kecenderungan wajib pajak dalam mencari cara untuk mengurangi beban pajak terutang yang harus di bayarkan kepada Negara disebabkan karena Wajib Pajak merasa membayar pajak dapat mengurangi laba atau pendapatan (kemampuan ekonomis) dan kenikmatan yang diperoleh atas kinerjanya. Selain itu, masyarakat kurang tertarik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena tidak adanya timbal balik langsung dari Negara, serta pajak yang sudah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Seperti kasus penggelapan

pajak yang terungkap pada tahun 2016, yaitu dilakukan oleh Soetijono yang merugikan negara sebesar Rp 5,8 Miliar. Selain itu tindakan penggelapan pajak juga pernah dilakukan oleh Suwir Laut pada tahun 2012 yang terbukti melakukan penggelapan pajak dengan tindak pidana menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan dengan isi tidak benar secara berlanjut selama empat tahun, terhadap 14 perusahaan senilai Rp 1,259 triliun. (Fitriyanti, 2017).

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang penggelapan pajak dilakukan oleh Dini Damayanti (2017) dengan variabel *Self Assessment System* menunjukkan bahwa *self Assessment System* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Charles Silaen (2015) dengan variabel teknologi informasi menunjukkan bahwa Teknologi informasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Pada penelitian ini mencoba menggabungkan variabel *Self Assessment System* dan Teknologi Informasi terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi, teknologi informasi dijadikan sebagai variabel pemoderasi karena kehadiran teknologi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tapi di beberapa kasus teknologi membuat wajib pajak menjadi tidak patuh karena data SPT tidak di verifikasi langsung. Kelemahan *Self Assessment System* adalah wajib pajak bisa dengan sengaja mengisi laporan dengan tidak benar (Ayu, 2013). Sehingga dengan sistem ini wajib pajak akan semakin cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena tindakan penggelapan pajak yang dianggap penyebab

tidak optimalnya pendapatan pajak dan merugikan negara. Dan bersama penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan *Self Assessment System* terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Maka dilakukan penelitian ini dengan judul "**Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Moderasi Teknologi Informasi Perpajakan (Study WPOP kantor DPRD Prov. Sulawesi Selatan)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Self Assessment system* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak WPOP Kantor DPRD Prov.Sulsel ?
2. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak WPOP Kantor DPRD Prov.Sulsel ?
3. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak dimoderasi teknologi informasi perpajakan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment system* terhadap tindakan penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi terhadap tindakan penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui *pengaruh self assessment system* terhadap tindakan penggelapan pajak dimoderasi Teknologi Informasi perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi KPP Makassar Selatan

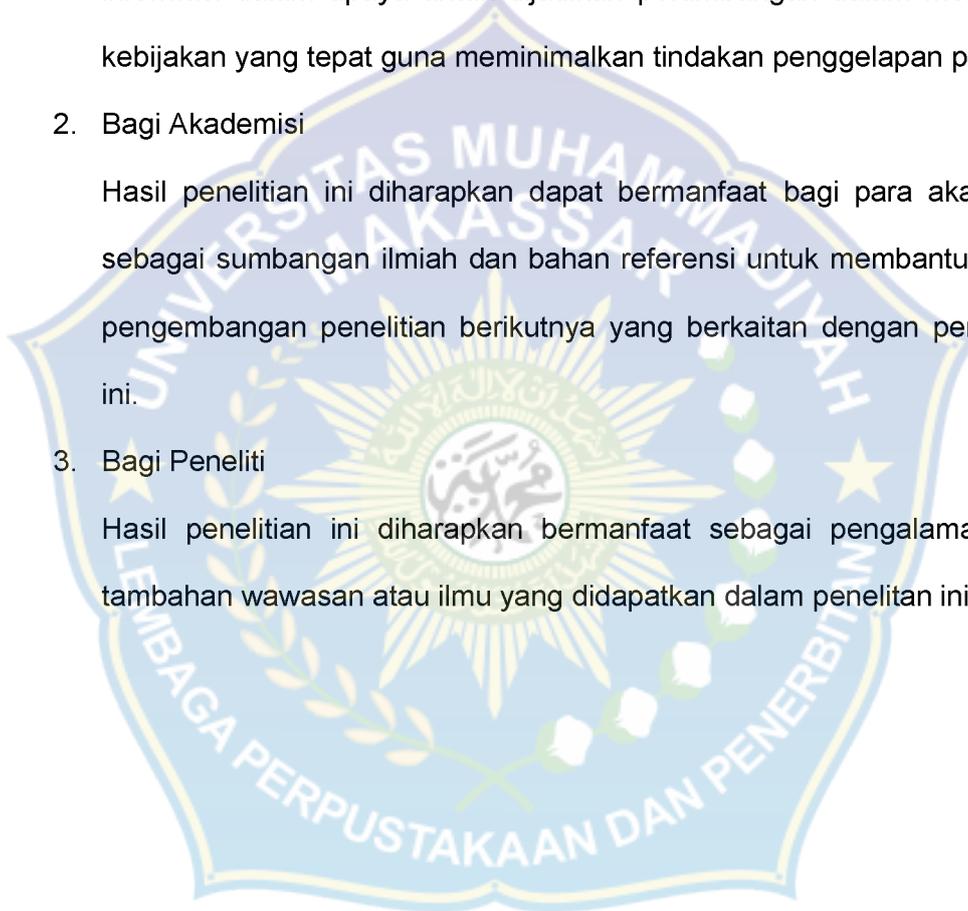
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor pelayanan pajak sebagai bahan masukan khususnya pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang tepat guna meminimalkan tindakan penggelapan pajak.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai sumbangan ilmiah dan bahan referensi untuk membantu dalam pengembangan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengalaman dan tambahan wawasan atau ilmu yang didapatkan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Theory Of Planned Behavior*

Ajzen pada tahun 1991 mengembangkan *Theory Of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) berkaitan dengan niat seseorang individu untuk melaksanakan, dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Menurut Ajzen, umumnya semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Kurniawati dan Toly, 2014).

Teori TPB (*Theory Of Planned Behavior*) tidak secara langsung berhubungan dengan kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi lebih menekankan pada pengaruh-pengaruh perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliti lain sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat

terhadap cara untuk bertingkah laku terhadap situasi yang terjadi (Nalendro, 2014).

Terdapat tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu yang dikemukakan oleh *Theory Of Planned Behaviour*, yaitu:

a. *Behavioral beliefs*

Kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. *Behavioural belief* merupakan keyakinan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory Of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.

b. *Normative beliefs*

Keyakinan tentang harapan normative yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). Dalam *Theory Of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif (*subjective norms*) terhadap perilaku.

c. *Control beliefs*

Keyakinan atau keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun eksternal faktor lingkungan. Variabel ini belum ada dalam

Theory Of Reasoned Action, kemudian ditambahkan pada *Theory Of Planned Behaviour*, disebut dengan *perceived behavioural control*.

Berdasarkan uraian diatas, hambatan yang mungkin timbul pada saat berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperolehnya dari perilakunya. Relevansi dari *Theory Of Plenned Behavior* dengan penelitian ini adalah ketika akan melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan *Self assessment system* dan Teknologi informasi perpajakan. Apabila penerapan *Self assessment system* dan Teknologi informasi perpajakan baik, maka akan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib atau memaksa, yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan telah diatur dalam Undang-undang. Pajak berperan sangat penting untuk keberlangsungan suatu negara, karena digunakan dalam upaya mensejahterakan rakyat. Untuk itu diperlukan kesadaran diri setiap Wajib Pajak untuk memenuhi perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari tindakan penggelapan pajak.

a. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak terdiri dari fungsi anggaran dan fungsi mengatur.

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari Official assessment system, Self assessment system, dan Withholding system.

a) *Official Assessment System*, suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung,

menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- c) *Withholding System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

3. *Self Assessment System*

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan, menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan jika *official assessment system* besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh fiskus (aparatur pajak).

Self assessment terdiri dari dua kata yaitu *Self* yang artinya sendiri dan *assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. *Self assessment system* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016)

Adapun ciri-ciri *Self assessment system* menurut Mardiasmo (2016), antara lain:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self assessment system*. Sehingga Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut (Friskianti, 2014):

1. Menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang telah diperolehnya.
2. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menghitung sendiri jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan.
4. Menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
5. Menyetor sendiri jumlah pajak yang masih harus disetor ke kas negara melalui bank persepsi.
6. Mengisi serta melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Setoran Pajak (SSP) ke DJP atau Kantor Pajak.

Menurut Friskianti (2014) adapun yang menjadi indikator *Self Assessment System* yaitu:

1. Mendaftar sebagai Wajib Pajak.
2. Menghitung pajak terutang oleh Wajib Pajak.

3. Menyetor pajak terutang oleh Wajib Pajak.

4. Pelaporan surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh Wajib Pajak.

4. Teknologi Informasi

Dirjen pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan dalam hal teknologi berlandaskan case management. Modernisasi ditandai dengan adanya teknologi informasi yaitu *e-system* perpajakan (Paramitha, 2016).

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015). Dengan semakin memadainya teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin efektif dan efisien (Silaen, 2015).

Teknologi informasi perpajakan yang sudah memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak (Permatasari, 2013). Menurut Sari (2013) ada beberapa fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seiring dengan modernisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk suatu tempat pelayanan yang terpadu di setiap KPP, seperti

penerimaan dokumen atau laporan perpajakan yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak sehingga tidak harus kemasing-masing seksi. Dengan adanya TPT ini memudahkan pengawasan terhadap peoses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

2. *Accouont Representative*

Salah satu ciri dari KPP modern adalah adanya *Account Representative* (AR). AR adalah pegawai Direktorat Jendral Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi Wajib Pajak secara langsung. Adanya *Account Representative* ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan antara KPP dan Wajib Pajak.

3. *Help Disk*

Help Disk diharapkan mampu menghilangkan kesulitan yang biasa dialami Wajib Pajak bila berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah, fasilitas *help disk* dengan teknologi *tax knowledge base*, menyangkut:

- a. Peraturan paja yang komprehensif dan terkini.
- b. Dikompilasi sesuai standar Q&A, *flowchart*, dan penjelasan singkat.
- c. Tersedia dalam komputer, sehingga mudah untuk diakses.
- d. Diharapkan mampu untuk menjaab berbagai permasalahan mengenai pajak.

4. *Complain Center*

Berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak yan terdaftar di KPP di wilayah kerjanya.

5. *Call Center*

Fungsi *call* utama yang ditangani *call center* menyangkut pelayanan (konfirmasi, prosedur, material perpajakan dan lainnya).

6. Media Informasi Pajak

Dengan adanya media informasi, Wajib Pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis.

7. Website

Untuk mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, maka dibuat website perpajakan yang dikelola DJP, yaitu www.pajak.go.id.

8. E-system perpajakan

Pemanfaatan dan penerapan *e-system* dimaksud agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, cepat, dan akurat. Beberapa *e-system* yang dimanfaatkan wajib Pajak, yaitu:

- a. *E-registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan DJP secara online.
- b. *E-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat diaplikasikan adalah lampiran SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN.
- c. *E-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan *real time*.

d. *Online Payment* adalah suatu cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik online seperti internet.

Berdasarkan uraian diatas Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah di sediakan oleh dirjen pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Menurut Silaen (2015) jika semakin baik teknologi dan informasi yang digunakan pemerintah, maka Wajib Pajak akan semakin beretika, sehingga semakin rendah tingkat upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib Pajak.

Menurut Silaen (2015) Adapun yang menjadi indikator Teknologi Informasi yaitu:

1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.
 2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.
 3. Akses informasi perpajakan yang mudah.
 4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.
 5. Mudah dipelajari.
6. Penggelapan Pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, masih banyak Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya dan senantiasa melakukan penggelapan pajak. Sebagaimana dikatakan oleh Dirjen

Pajak Fuad Rahmany, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak membayar pajaknya, sehingga target penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain (Friskianti, 2014). Penggelapan pajak terjadi dikarenakan perbedaan pandangan masyarakat dengan pandangan pemerintah terhadap pajak (Wahyuningsih, 2015). Perbedaan ini dikarenakan minimnya informasi mengenai pengalokasian dana pajak terhadap penerimaan dana pajak yang diterima setiap tahunnya. Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah ini, seharusnya pemerintah bersikap transparan agar hasil penerimaan yang diterima dapat digunakan dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Wahyuningsih, 2015).

Menurut Halim (2016: 8) penggelapan pajak adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak pembayaran pajak. Sedangkan menurut Santoso dan Rahayu (2013: 6) penggelapan pajak merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan pajak dengan cara melawan ketentuan perpajakan yang dapat dihukum dengan denda dan sanksi pidana.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Hasanah dan Pahala (2015:8), tindakan penggelapan pajak dapat berupa:

1. Tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu.

2. Tidak mengisi SPT dengan benar dan lengkap.
3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau telah dipungut.
4. Membuat faktur pajak fiktif.
5. Membuat pembukuan berganda (*double bookkeeping*).
6. Tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menyalahgunakan NPWP dan sebagainya.

Menurut Sari (2013) penggelapan pajak dapat menimbulkan akibat negatif dalam tiga bidang, yaitu:

1. Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas Negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan keadaan inflasi.

2. Dalam Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak berpengaruh buruk terhadap persaingan diantara para pengusaha. pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar untuk meminimalisir pajak terutang, sehingga memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan menyebabkan langkanya modal karena Wajib Pajak berusaha untuk menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut kepasar modal, yang mengakibatkan terjadinya stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi.

3. Dalam Bidang Psikologi

Wajib Pajak yang terbiasa menggelapkan pajak sama halnya untuk selalu membiasakan melanggar Undang-undang. Penggelapan pajak yang tidak diketahui oleh fiskus akan membuat pelaku merasa untung dan berkeinginan untuk terus melakukan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan tindakan ilegal yang berakibat dapat merugikan negara. Menurut Rahman (2013) tindakan penggelapan pajak memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil ataupun non materil (Rahman, 2013). Dari segi materi, perbuatan penggelapan pajak akan menguntungkan jangka panjang bagi wajib pajak itu sendiri, akan tetapi konsekuensi yang terjadi apabila penggelapan pajak tersebut terungkap maka akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi Wajib Pajak.

Menurut Friskianti (2014) Adapun yang menjadi indikator penggelapan pajak yaitu:

1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
2. Menyampaikan surat pemberitahuan dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri.
4. Tidak menyetor pajak yang telah dipungut atau dipotong.

B. Tinjauan Empiris

Menurut Sugiyono (2013) Empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indra manusia, sehingga cara atau metode

yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain.

Beberapa studi empiris yang menjadi acuan dalam penulisan ini antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Masalah	Hasil	Perbedaan
1	Pratiwi (2017)	Pengaruh pemahaman perpajakan, <i>self assessment system</i> dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	Regresi linier berganda	Apakah pemahaman perpajakan, <i>self assessment system</i> , dan tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan, <i>self assessment system</i> dan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.	Penelitian ini terdapat 3 variabel independen dan tidak ada variabel teknologi informasi sebagai pemoderasi.
2	Safira (2018)	Pengaruh <i>self assessment system</i> dan Pemeriksaan Pajak terhadap <i>tax evasion</i> .	Kuantitatif dengan bentuk hubungan kausal.	Apakah <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap <i>tax evasion</i> .	Variabel independen dalam penelitian ini adalah <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak, tidak ada variabel independen teknologi informasi sebagai pemoderasi.
3	Dini (2017)	Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib	Analisis regresi berganda	Apakah keadilan, <i>self assessment system</i> , diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan, <i>self assessment system</i> dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap	Variabel independen dalam penelitian ini ada 4, dan hanya variabel <i>self assessment system</i> yang sama dengan

		Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak		pajak.	persepsi wajib pajak dalam penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.	penelitian saya.
4	Mira (2016)	Pengaruh <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan terhadap <i>tax evasion</i> dengan moralitas pajak sebagai variabel moderat.	Analisis regresi berganda	Apakah <i>self assessment system</i> , pemeriksaan, dan moralitas pajak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak serta moral pajak sebagai variabel berpengaruh signifikan terhadap <i>tax evasion</i> .	Penelitian ini variabel moralitas pajak digunakan sebagai pemoderasi. Sedangkan dalam penelitian saya yang menjadi variabel pemoderasi adalah teknologi informasi.
5	Friskianti (2014)	Pengaruh <i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .	Analisis regresi berganda	Apakah <i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> , keadilan, dan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . Sedangkan kepercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .	Variabel independen dalam penelitian ini ada 5.berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian saya variabel teknologi informasi dijadikan sebagai variabel pemoderasi.
6	Silaen (2015)	Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi,	Regresi linier berganda	Apakah sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan,	Penelitian ini tidak menggunakan variabel <i>Self</i>

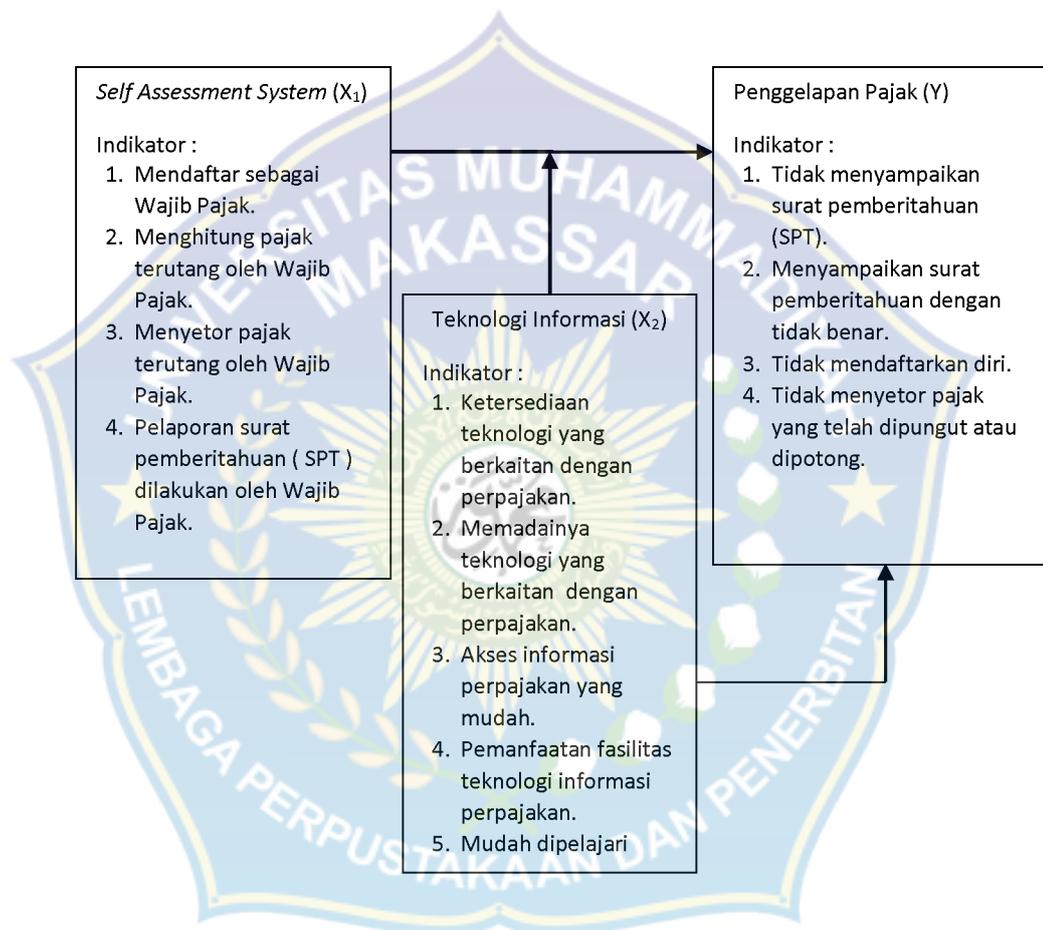
		teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).		informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.	diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> .	<i>assessment system</i> , dan adanya variabel teknologi informasi tidak sebagai variabel pemoderasi.
7	Kiswanto (2014)	Pengaruh keadilan, tarif pajak, ketetapan pengalokasian kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap <i>tax evasion</i> .	Statistik deskriptif dan regresi linier.	Apakah keadilan, tarif pajak, ketetapan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan, tarif pajak, ketetapan pengalokasian kecurangan, teknologi dan informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> .	Penelitian ini tidak menggunakan variabel <i>self assessment system</i> dan variabel teknologi informasi bukan sebagai variabel pemoderasi.
8	Armeliza (2017)	Pengaruh ketetapan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	Regresi linier berganda.	Apakah ketetapan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh penggelapan pajak. Sedangkan teknologi informasi perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.	Penelitian ini terdapat 3 variabel independen, namun tidak ada variabel <i>self assessment system</i> dan adanya variabel teknologi informasi bukan sebagai variabel pemoderasi.

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan rekomendasi penelitian terdahulu, maka pada penelitian ini objek yang akan diteliti adalah Wajib Pajak orang pribadi. Namun pada penelitian ini objek yang diteliti merupakan WOPW di kantor DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan. Penelitian ini menguji pengaruh variabel *Self assessment system* (X_1) yang dimoderasi dengan Variabel Teknologi informasi (X_2) terhadap tindakan penggelapan pajak (Y).

Berikut kerangka konsep yang dituangkan dalam penelitian ini.



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konsep diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

1. *Self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.
2. Teknologi informasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.
3. *Self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak dimoderasi teknologi informasi perpajakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di jalan Urip Sumohardjo No.59 Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD karena sebagian besar masyarakat tidak lagi membayarkan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak dikarenakan telah tersedianya program layanan pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Waktu penelitian ini selama 2 bulan pada bulan Juni – Agustus 2019. dilanjutkan dengan analisis data dan penyusunan hasil penelitian.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang peneliti gunakan adalah variabel dependen dan variabel independen variabel dependen adalah suatu bentuk variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau

timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Self assessment system* dan Teknologi informasi.

1. *Self Assessment System* (X_1)

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan²⁴ sepenuhnya kepada Wajib Pajak mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa *Self assessment system* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *Self assessment system* menurut Friskianti (2014) adalah:

1. Mendaftar sebagai Wajib Pajak.
2. Menghitung pajak terutang oleh Wajib Pajak.
3. Menyetor pajak terutang oleh Wajib Pajak.
4. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pengukuran variabel *Self assessment system* menggunakan pengukuran skala likert 5 poin, yaitu:

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Kurang setuju
4. Setuju
5. Sangat
6. setuju

2. Teknologi Informasi (X_2)

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Teknologi informasi menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Silaen (2015), yaitu:

1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.
3. Akses informasi perpajakan yang mudah.
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.
5. Mudah dipelajari

Pengukuran variabel Teknologi informasi menggunakan skala likert 5 poin, yaitu:

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Kurang setuju
4. Setuju
5. Sangat setuju.

3. Penggelapan Pajak (Y)

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011) penggelapan pajak adalah usaha yang

dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang. Dikarenakan melanggar Undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penggelapan pajak menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Friskianti (2014) yaitu:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.

Pengukuran variabel penggelapan pajak menggunakan skala likert 5 poin, yaitu:

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Kurang setuju
4. Tidak setuju
5. Sangat tidak setuju

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugyono,

2013:389). Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:119). Metode pengambilan Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Cara ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan metode non probabilitas, dimana sampel dipilih dengan pertimbangan kemudahan. Tingkat kesalahan dalam penelitian ini adalah 5% dengan tingkat kepercayaan 95%.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data utama penelitian ini diperoleh melalui *survey* menggunakan kuesioner. Kuesioner digunakan dalam rangka mendapatkan informasi akan hal-hal yang berkaitan langsung dengan variabel-variabel penelitian. Kuesioner diberikan langsung kepada Wajib pajak orang pribadi (WPOP) kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan *Personally administered questionnaires*, yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti.

Pengukuran variabel menggunakan skala likert 5 poin.

Untuk variabel X_1 dan X_2	Untuk variabel Y
Skor/Nilai 1 : Sangat tidak setuju	Skor/Nilai 5 : Sangat tidak setuju
Skor/Nilai 2 : Tidak setuju	Skor/Nilai 4 : Tidak setuju
Skor/Nilai 3 : Kurang setuju	Skor/Nilai 3 : Kurang setuju
Skor/Nilai 4 : Setuju	Skor/Nilai 2 : Setuju
Skor/Nilai 5 : Sangat setuju	Skor/Nilai 1 : Sangat setuju

F. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 24. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

1. Statistik Deskriptif

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugyono (2013:208) yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Fungsi dari analisis deskriptif yaitu untuk menyederhanakan kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Pengukuran tersebut dapat berupa ukuran-ukuran statistik, tabel, dan grafik.

2. Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + e \dots (1)$$

$$Y = a + \beta_2 X_1 + \beta_3 X_2 + e \dots (2)$$

$$Y = a + \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_1 \cdot X_2 + e \dots (3)$$

Keterangan:

Y = Tindakan penggelapan pajak

α = Konstanta

β = Koefisien

X_1 = *Self assessment system*

X_2 = Teknologi informasi

e = *Error*

3. Uji Kualitas Data

1) Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuesioner penelitian. Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan (Ghozali, 2011).

2) Uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besarnya nilai *Cronbach's alpha* masing-masing instrument dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika besarnya nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6 (Ghozali, 2011).

4. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melaksanakan uji statistik, yang perlu dilakukan sebagai langkah awal pengujian adalah memastikan setiap variabel berdistribusi normal dan independen.

1) Uji normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Indikator model regresi yang baik adalah memiliki data distribusi normal. Ada dua acara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat analisis grafik atau uji statistik. Jika menggunakan grafik, normalitas dapat dideteksi dengan melihat tabel histogram. Untuk jumlah sampel yang kecil dapat dibantu dengan melihat normal probability plot, membandingkan distribusi kumulatif data asli dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2011). Untuk menguji normalitas residual pada uji statistik dapat digunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov –smirnov (K-S), dengan membuat hipotesis:

1. H_0 : Data residual terdistribusi normal
2. H_a : Data residual tidak terdistribusi normal.

2) Uji multikolinearitas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolonieritas. Artinya variabel independen yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan secara sempurna. Untuk mengujinya dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan VIF (*variance inflation factor*) melalui

program SPSS. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinieritas.

3) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu arah pengamatan kepengamatan lain yang tetap. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Uji hipotesis

Secara statistik, model regresi dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik T dan nilai statistik F. Apabila nilai uji statistiknya berada didaerah kritis (H_a diterima) maka perhitungan tersebut signifikan. Sebaliknya bila nilai uji statistiknya berada didaerah (H_a ditolak) maka perhitungannya tidak signifikan.

1) Uji R^2 atau uji koefisien determinasi

Uji R^2 (uji determinasi) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). ketika nilai R^2 semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y dimana $0 < R^2 < 1$. Sebaliknya, ketika R^2 semakin kecil (mendekati nol), maka akan dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat.

2) Uji F (*f-test*)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk menguji variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Berdasarkan Sugyono (2013), rumus F hitung sebagai berikut:

$$Fh = \frac{R/k}{(1 - R)/(n - K - 1)}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

K = Jumlah variabel independen.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan seluruh variabel independen yang diuji merupakan variabel yang tepat dalam memprediksi variabel dependen.
- b. Jika nilai F hitung < F tabel atau nilai signifikansi > 0.05 maka dapat disimpulkan seluruh variabel independen yang diuji merupakan variabel yang tidak tepat dalam memprediksi variabel dependen.

3) Uji T (*t-test*)

Uji T adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%).

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai signifikansinya $<$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel independen terbukti berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai t hitung $<$ t tabel atau nilai signifikansinya $>$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel independen tidak terbukti berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat kantor DPRD Prov. Sulawesi Selatan

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menurut Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, sebagai unsur. Pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Kedudukan ini menyebabkan DPRD mempunyai tugas dan tanggung jawab tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga untuk menyukseskan pelaksanaan tugasnya, jelas membutuhkan adanya unit kerja pembantu kesiapan dan kelancaran kegiatan administrasi. Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan tugasnya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki alat kelengkapan yang disebut sekretariat. Sekretariat ini merupakan unsur staf yang membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris, yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua DPRD dan teknis administrasi di bawah bimbingan setwilda Provinsi Sulawesi Selatan. Pada dasarnya sejarah keberadaan sekretariat tidak dapat dipisahkan dengan sejarah keberadaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada awal lahirnya DPRD yang diberi nama DPRD-GR pada Tahun 1962, Sekretariat bernama Biro Urusan Dewan berlokasi di Jalan Riburane Ujung Pandang (Kantor Pembantu Gubernur Wilayah I/DKM sekarang). Biro Urusan Dewan selanjutnya berubah menjadi sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dimulai pada saat terbitnya peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 1982 Tentang

struktur organisasi dan tata kerja sekretariat wilayah atau daerah dan sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Perda tersebut, sekretariat DPRD terbagi atas bagian yaitu Umum, Persidangan Dan Risalah, Keuangan, Dan Humas Protocol.

2. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

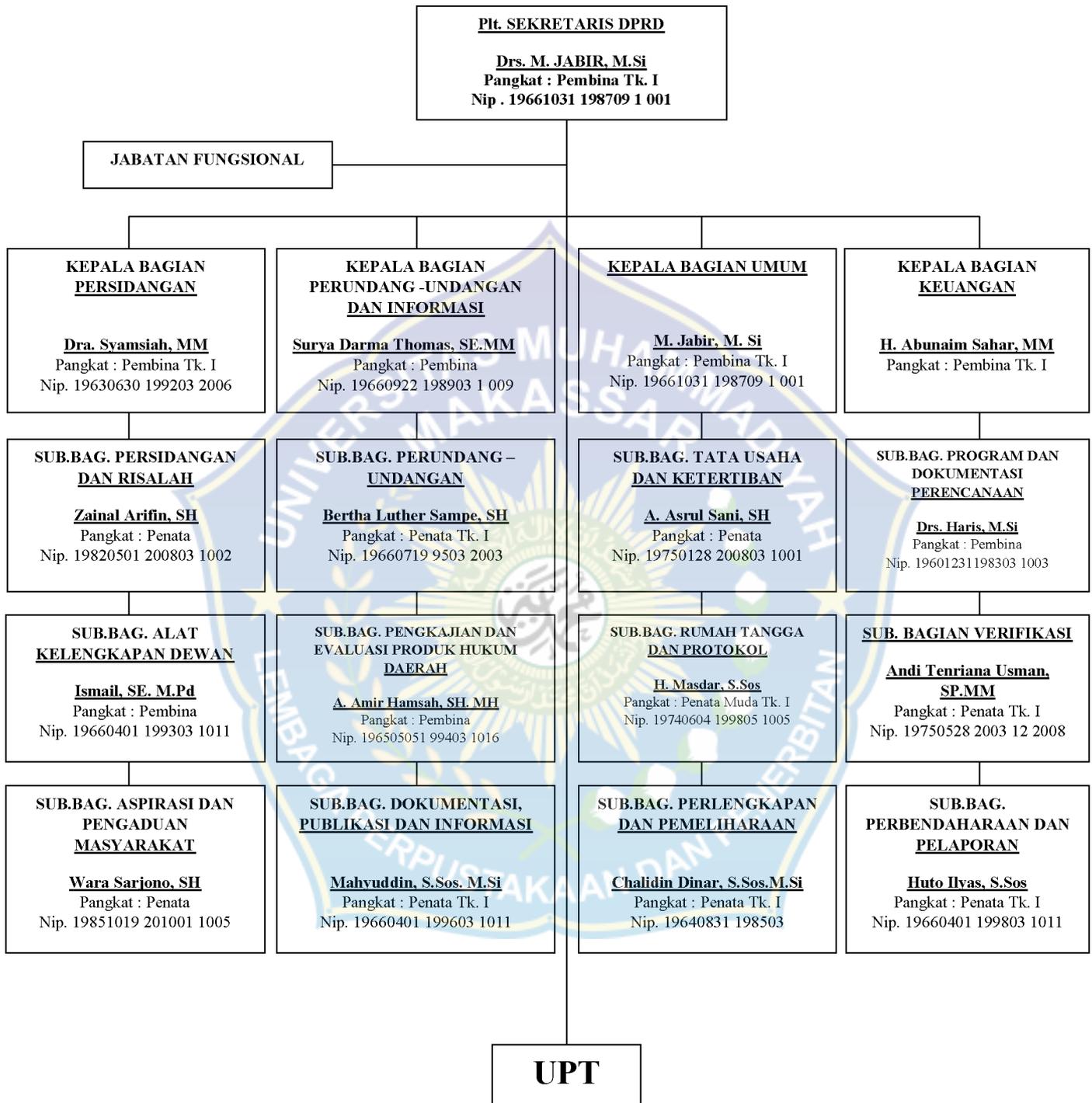
Visi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: “Hadirkan Pelayanan kesekretariatan yang berkualitas, responsive, fleksibel dan akuntabilitas, dalam mendukung peningkatan kinerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.”

2. Misi

- a) Peningkatan fasilitas pelayanan internal Sekretariat DPRD
- b) Peningkatan kapasitas dan kinerja Organisasi Sekretariat DPRD.
- c) Peningkatan system perencanaan dan evaluasi kinerja Organisasi Sekretariat DPRD.
- d) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
- e) Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD.
- f) Peningkatan produk hukum daerah.
- g) Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- h) Peningkatan kapasitas DPRD
- i) Peningkatan penjangkaran aspirasi masyarakat.

3. Struktur Organisasi dan Job Description

1. Struktur Organisasi



2. Job Description

- a. **Bagian Persidangan** bertugas mengkoordinasikan pelayanan persidangan dan penyediaan risalah serta memfasilitasi layanan penyampaian aspirasi/ pengaduan masyarakat.
- b. **Bagian Perundang-undangan dan Informasi** bertugas membantu sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan, menelaah dan mengkaji bahan penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan serta melakukan dokumentasi, publikasi dan informasi terhadap pelaksanaan DPRD.
- c. **Bagian Umum** bertugas membantu sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberi pelayanan teknis dan administrasi ketatausahaan dan ketertiban, kerumahtanggaan dan protokol serta perlengkapan dan pemeliharaan dalam lingkup DPRD dan sekretariat DPRD.
- d. **Bagian Keuangan** bertugas membantu sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program dan dokumen perencanaan, pembendaharaan dan pelaporan keuangan, verifikasi administrasi keuangan DPRD dan sekretariat DPRD.

B. Objek Penelitian

1. Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner yang disebar berjumlah 75 kuesioner, yang dilakukan pada juli 2019. Dari keseluruhan jumlah

kuesioner yang disebar, adapun jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah yaitu 53 kuesioner.

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	75
2	Kuesioner yang dikembalikan	53
3	Kuesioner yang dapat diolah	53

Sumber : Data hasil pengisian kuesioner, 2019

2. Deskripsi Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi dikantor DPRD Prov.Sulawesi Selatan. Berdasarkan 53 kuesioner yang dapat diolah, diperoleh informasi mengenai deskripsi responden yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	35	66%
Perempuan	18	34%
Total Responden	53	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 yakni deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 35 orang (66%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 18 orang (34%).

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
20-25	5	9%
26-35	11	21%
36-55	32	61%
>55	5	9%
Total Responden	53	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 yakni deskripsi responden berdasarkan umur, menunjukkan bahwa responden berumur 20-25 tahun sebanyak 5 orang (9%), responden yang berumur 26-35 tahun sebanyak 11 orang (21%), responden yang berumur 36-55 tahun sebanyak 32 orang (61%), dan responden yang berumur >55 tahun sebanyak 5 orang (9%).

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
S3	1	2%
S2	6	11%
S1	33	62%
D3	2	4%
Lainnya	11	21%
Total Responden	53	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir, menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir S3 sebanyak 1 orang (2%), responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 6 orang (11%), responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 33 orang (62%), responden dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 2 orang (4%) dan responden dengan pendidikan terakhir lainnya sebanyak 11 orang (21%).

C. Hasil Analisis

1. Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu *Self Assessment System*, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Penggelapan pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penggelapan Pajak	53	20.00	25.00	23.4151	1.36486
Self Assessment System	53	18.00	25.00	23.4151	1.73686
Teknologi Informasi Perpajakan	53	14.00	24.00	19.2453	2.62316
Valid N (listwise)	53				

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 53. Dari 53 responden ini variabel independen *Self Assessment System* memiliki nilai minimum 18.00 nilai maksimum 25.00 nilai mean 23.4151, dengan standar deviasi 1.73686, hal ini menunjukkan bahwa besar penyimpangan dari variabel *self assessment system* dalam peneltian ini sebesar 1.73686. Teknologi informasi perpajakan memiliki nilai minimum 14.00 nilai maksimum 24.00 nilai mean 19.2453, dengan standar deviasi 2.62316, hal ini menunjukkan bahwa besar penyimpangan dari variabel teknologi informasi perpajakan dalam penelitian ini sebesar 2.62316. sedangkan variabel dependen penggelapan Pajak memiliki nilai minimum 20.00 nilai maksimum 25.00 nilai mean 23.4151 dengan standar deviasi 1.36486, hal ini menunjukkan bahwa besar penyimpangan variabel Penggelapan pajak dalam penellitian ini sebesar 1.36486.

2. Regresi Linier Berganda

Metode regresi linear berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda terhadap terhadap kedua variabel, yaitu *Self assessment system* dan Teknologi informasi perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.020	2.580		6.984	.000
	Self Assessment System	.337	.097	.428	3.488	.001

Teknologi Informasi Perpajakan	- .129	.064	- .248	-2.023	.048
Moderasi	- .053	.046	-2.719	-1.132	.263

a. Dependent Variable: Pengeluaran Pajak
 Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.6 maka diperoleh persamaan regresi berikut:

$$Y = 18.020 + 0.337X_1 + (-0.129)X_2 + (-0.053)X_3$$

3. Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam hal ini digunakan item pernyataan yang diharapkan dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur.

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Self Assesment System

variabel	Indikator	Nilai	Nilai	keterangan
		R_{hitung}	R_{tabel}	
Self assessment system (X1)	X1.1	0,296	0,2241	Valid
	X1.2	0,564	0,2241	Valid
	X1.3	0,682	0,2241	Valid
	X1.4	0,579	0,2241	Valid
	X1.5	0,608	0,2241	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel self assessment system terdiri atas 5 item pernyataan, dari ke lima item pernyataan adalah valid karena dilihat dari perbandingan koefisien r

hitung dengan r tabel menunjukkan r hitung lebih besar dari r tabel yang mengindikasikan item tersebut valid.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Teknologi Informasi Perpajakan

variabel	Indikator	Nilai	Nilai	keterangan
		R_{hitung}	R_{tabel}	
Teknologi informasi perpajakan (X2)	X2.1	0,497	0,2241	Valid
	X2.2	0,489	0,2241	Valid
	X2.3	0,516	0,2241	Valid
	X2.4	0,536	0,2241	Valid
	X2.5	0,543	0,2241	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* terdiri atas 5 item pernyataan, dari ke lima item pernyataan adalah valid karena dilihat dari perbandingan koefisien r hitung dengan r tabel menunjukkan r hitung lebih besar dari r tabel yang mengindikasikan item tersebut valid.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak

variabel	Indikator	Nilai	Nilai	keterangan
		R_{hitung}	R_{tabel}	
Penggelapan pajak (Y)	Y.1	0,591	0,2241	Valid
	Y.2	0,526	0,2241	Valid
	Y.3	0,532	0,2241	Valid
	Y.4	0,630	0,2241	Valid
	Y.5	0,596	0,2241	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* terdiri atas 5 item pernyataan, dari ke lima item pernyataan adalah valid karena dilihat dari perbandingan koefisien r

hitung dengan r tabel menunjukkan r hitung lebih besar dari r tabel yang mengindikasikan item tersebut valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistic *Cronbach Alpha* (α). variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$. Semakin nilai *alpha* mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel.. dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N Of Items	keterangan
Self assessment system	0,708	5	Reliabel
Teknologi informasi perpajakan	0,672	5	Reliabel
Penggelapan pajak	0,718	5	Reliabel

Sumber : data primer yang diolah,2019

Tabel 4.10 menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* atas variabel *self assessment system* sebesar 0,708, variabel teknologi informasi perpajakan sebesar 0,672 dan variabel penggelapan pajak sebesar 0,718. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang

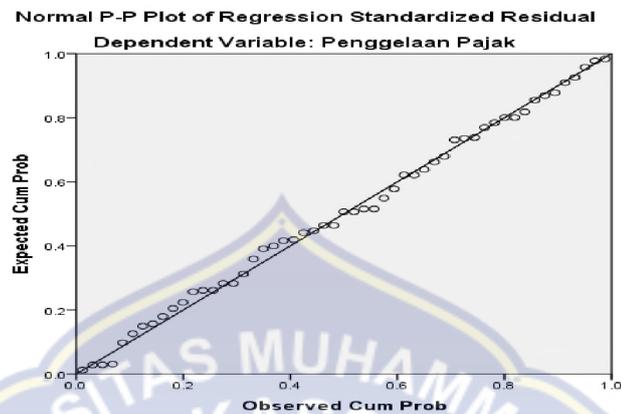
konsisten. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang ada pada kuesioner mampu mengukur peubah yang didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali, 2011).

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Data-data bertipe skala pada umumnya mengikuti asumsi distribusi normal. Namun tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Dengan demikian analisis statistik yang dapat digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu *Self assessment system*, Teknologi informasi perpajakan dan Penggelapan pajak. Keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, berikut ini gambar grafik uji normalitas data pada grafik *pp-plot* :

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Data



Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas.

Tabel 4.11

Non Parametric one sample kolmogrov smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.18539829
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.049
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
<p>a. Test distribution is Normal.</p> <p>b. Calculated from data.</p> <p>c. Lilliefors Significance Correction.</p> <p>d. This is a lower bound of the true significance.</p>		

Metode kedua yang biasa digunakan untuk uji normalitas adalah dengan Non Parametric one sample kolmogrov smirnov. Kriteria pengujian dengan menggunakan kolmogrov smirnov adalah jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tidak normal, sebaliknya apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan normal. Berdasarkan tabel 4.11 diatas maka model regresi ini adalah normal, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantar variabel independen. Apabila nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas, sebaliknya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

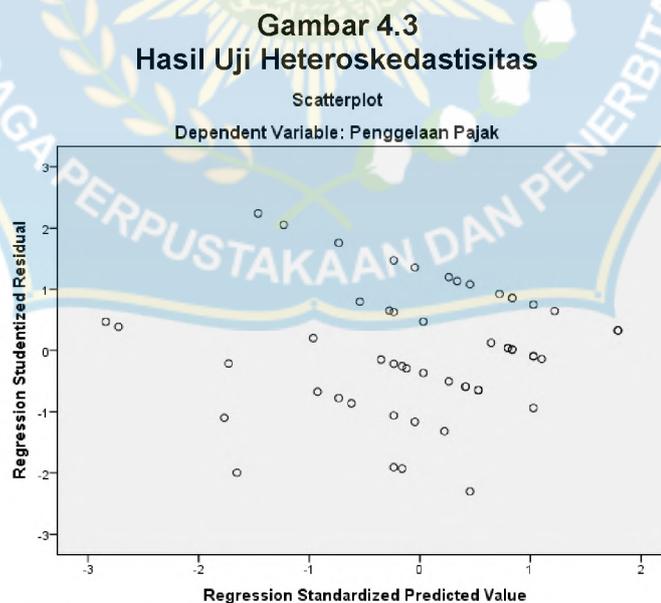
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 SAS	1.000	1.000
TIP	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PP

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai dari VIF < 10. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa uji multikolinearitas terpenuhi, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.3 dibawah ini:



Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari grafik *scatterplot* yang ada pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

5. Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji R^2 atau Uji Koefisien Determinasi

Dalam uji regresi linear berganda koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, untuk itu maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Adapun hasil uji *Adjusted R²* :

Tabel 4.13

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.515 ^a	.265	.220	1.20550	1.924

a. Predictors: (Constant), moderasi , self assessment system, teknologi informasi perpajakan

b. Dependent Variable: penggelapan pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.13 *model summary*, diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,265, hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (*self assessment system* dan teknologi informasi perpajakan) terhadap variabel dependen (penggelapan pajak) sebesar 26,5%, atau variasi variabel

independen yang digunakan dalam model (*self assessment system* dan teknologi informasi perpajakan) mampu menjelaskan sebesar 26,5% variasi variabel dependen (penggelapan pajak). Sedangkan sisanya sebesar ($100\% - 26,5\% = 73,5\%$) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti variabel sistem perpajakan, diskriminasi (Silaen, 2015), keadilan (Kiswanto, 2014) dan ketetapan pengalokasian (Armelize, 2017) diharapkan variabel lain juga akan mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Jadi terdapat banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

2. Hasil Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Uji F dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan menolak H_a , artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji F penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14

Tabel 4.14

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.660	3	8.553	5.886	.002 ^b
	Residual	71.208	49	1.453		
	Total	96.868	52			

a. Dependent Variable: penggelapan pajak

b. Predictors: (Constant), moderasi, self assessment system, teknologi informasi perpajakan

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 5.886 dengan signifikan sebesar 0,002 yang berarti nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Atau dengan kata lain *self assessment system* dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap tindakan penggelapan pajak.

3. Hasil Uji T (Parsial)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat dari tingkat signifikansi 0,05. Jika *probability t* < 0,05 maka H_a diterima, sedangkan jika *probability t* > 0,05 maka H_a ditolak. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.15

Tabel 4.15
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.020	2.580		6.984	.000
	Self Assessment System	.337	.097	.428	3.488	.001
	Teknologi Informasi Perpajakan	-.129	.064	-.248	-2.023	.048
	Moderasi	-.053	.046	-2.719	-1.132	.263

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak
Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hasil Uji Hipotesis 1 : Pengaruh *Self assessment system* terhadap tindakan penggelapan pajak

Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel 4.15 variabel *self assessment system* mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi *self assessment system* $0,001 < 0,005$, hal ini berarti bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, yang berarti H_1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Pratiwi (2017) dan Safira (2018).

- 2) Hasil Uji Hipotesis 2 : Pengaruh Teknologi informasi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak

Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel 4.15 variabel teknologi informasi perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,048. Karena nilai signifikansi teknologi

informasi perpajakan $0,048 < 0,05$, hal ini berarti bahwa variabel teknologi informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, yang berarti H_2 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Silaen (2015) dan Armeliza (2017).

Hasil Uji Hipotesis 3 : pengaruh Self System terhadap tindakan penggelapan pajak dimoderasi teknologi informasi

Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada table 4.15 menunjukkan nilai yang tidak signifikan yaitu sebesar $0,263 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa teknologi informasi perpajakan tidak memoderasi hubungan antara self assessment system dengan tindakan penggelapan pajak.



D. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan dalam menguji pengaruh *self assessment system*, teknologi informasi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak dan pengujian *self assessment system* terhadap tindakan penggelapan pajak dimoderasi teknologi informasi perpajakan.

1. *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak

Dari hasil uji hipotesis variabel *self assessment system* mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi *self assessment system* $0,001 < 0,005$, hal ini berarti bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Pratiwi (2017) dan Safira (2018).

Self assessment system memadai (bagus) ternyata akan meningkatkan tindakan penggelapan pajak, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, belum lagi adanya program konseling dimana wajib pajak yang mendapatkan surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP) sebelum dilakukan pemeriksaan, diminta untuk melakukan konseling melalui AR atau devisi pemeriksaan di KPP dimana wajib pajak tersebut terdaftar sebagai wajib pajak, hal ini akan memberikan peluang bagi wajib pajak untuk bisa menunda pembayaran pajak atau lebih fatal adalah melakukan kecurangan perpajakan.

2. Teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak

Dari hasil uji hipotesis variabel teknologi informasi perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,048. Karena nilai signifikansi teknologi informasi perpajakan $0,048 < 0,05$, hal ini berarti bahwa variabel teknologi informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, yang berarti H_2 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Silaen (2015) dan Armeliza (2017).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi perpajakan yang memadai akan menurunkan tindakan penggelapan pajak, hal ini berarti kehadiran teknologi informasi mampu mendeteksi atau meminimalkan penggelapan pajak yang akan dilakukan wajib pajak, seperti adanya penggunaan e-billing, e-filling, e-registration yang dapat memudahkan wajib pajak dalam proses menjalankan kewajiban perpajakannya.

3. *Self Assessment System* dimoderasi teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak

Hasil uji hipotesis 3 yang menunjukkan nilai yang tidak signifikan yaitu sebesar $0,263 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa teknologi informasi perpajakan tidak memperkuat hubungan antara *self assessment system* dengan tindakan penggelapan pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa *self assessment system* dan teknologi informasi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak. Responden pada penelitian ini berjumlah 53 wajib pajak orang pribadi (WPOP) kantor DPRD Prov. Sulawesi selatan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.

pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel *self assessment system* berpengaruh dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Dini (2017), Pratiwi (2017) dan Safira (2018) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

2. Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak.

Pengujian hipotesis ditemukan bahwa variabel teknologi informasi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Silaen (2015) dan Armeliza (2017) yang menyatakan bahwa Teknologi informasi

perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

3. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Dimoderasi Teknologi Informasi Perpajakan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Self assessment system* dimoderasi teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Yang berarti teknologi informasi tidak memberikan hubungan yang kuat pada variabel *self assessment system* terhadap tindakan penggelapan pajak.

B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *Self assessment system* dan penggunaan teknologi Informasi perpajakan sangat penting dalam upaya pencegahan tindakan penggelapan pajak khususnya di kota Makassar. Maka perlu adanya analisa dan tindaklanjut mengenai *Self assessment system* dan teknologi informasi perpajakan dengan demikian peneliti akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Menambahkan variasi jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang lebih baik.
2. Menambahkan variasi jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak, seperti diskriminasi, ketepatan pengalokasian dan budaya yang berbeda.
3. Tidak hanya menggunakan kuesioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP).

4. Pentingnya sosialisasi untuk memberikan kesadaran kepada para WPOP agar menjadi Wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari tindakan penggelapan pajak agar penerimaan pajak bisa lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, T. K., dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Semarang.
- Ayu, Vanny. 2013. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion: Survey pada KPP dilingkungan Kanwil Jabar I*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Damayanti, Dini. 2017. *Pengaruh Keadilan, Self Assessment system, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak*. JOMFEKON. Vol 4 (1).
- Fitriyanti, I., Fauzi, A., dan Armeliza, D. 2017. *Pengaruh Ketetapan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. *Jurnal ilmiah wahana akuntansi*, Vol 12 (1). Universitas Negeri Jakarta.
- Friskianti, Yossi. 2014. *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5"*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi kasus, Edisi 2*. Jakarta. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, Nuramalia, dan Pahala, I. 2015. *Manajemen Pajak*. Jakarta: Lembaga pengembangan pendidikan UNJ.
- Kurniawati, Meiliana, dan Tolly, A.A. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax dan Accounting Review*, Vol 4 (1) Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nalendro, T. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Nugroho, Adi, R. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel intervening. *Diponegoro journal Of Accounting* Vol 1 Semarang.
- Paramitha, A.A., Pradnya, M., dan Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak

- Mengenai Penggelapan Pajak. *E-jurnal Akuntansi* 17 (2). Universitas Udayana, Bali.
- Permatasari, I., dan Iaksono, H. 2013. *Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2 (2). Universitas Diponegoro Semarang.
- Purwanto, Sulaeha, T., dan Safira, H. 2018. Pengaruh Self Assesment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion. *Ekspansi*, Vol 10 (2).
- Rahman, Suryani, I. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Santoso dan Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management*. Jakarta: *Observation Research Of Taxation (ortax)*.
- Setiawan, Erey, P., dan Muliari, N.,K. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol 601.
- Silaen, Charles. 2015. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. *JOMFEKON*,2 (2).Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sugyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuningsih,D.T. 2015. *Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- <https://m.detik.com>.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : kuesioner penelitian

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu Responden

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma
Nim : 105730 5372 15
Jurusan : Akuntansi

mengajukan permohonan pengisian kuesioner yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian yang berjudul **“PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK DIMODERASI INFORMASI PERPAJAKAN (Study WPOP Kantor DPRD PROV.SULSEL)”**.

Sesuai dengan judul penelitian tersebut, objek dari penelitian ini adalah Anggota Dewan di kantor DPRD Prov.Sulsel. Untuk mendukung penelitian ini, saya mengharapkan bantuan bapak / ibu untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan bersama dengan surat ini.

Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu saya mengharapkan kejujuran dalam pengisian kuesioner. Saya menjamin kerahasiaan dari semua pendapat / opini / jawaban yang bapak / ibu berikan dalam kuesioner terlampir sesuai dengan etika penelitian.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Risma

IDENTITAS RESPONDEN

Beritanda (√) pada identitas pengenal Bapak,/Ibu/Saudara

1. Nama :
2. Umur : 20-25 26-35
 36-55 >55
3. Jenis Kelamin : Pria Wanita
4. Pendidikan Terakhir: S3 S2 S1 D3
Lainnya
5. Lama Bekerja : < 1 Tahun
 Antara 1-5 tahun
 Antara 6-10 tahun
 > 10 Tahun

Cara Pengisian Kuesioner :

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda silang (√) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban adalah sebagai berikut:

Untuk variabel X_1 dan X_2

Untuk variabel Y

Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor/Nilai 5 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)

Skor/Nilai 4 : Tidak Setuju (TS)

Skor/Nilai 3 : Kurang Setuju (KS)

Skor/Nilai 3 : Kurang Setuju (KS)

Skor/Nilai 4 : Setuju (S)

Skor/Nilai 2 : Setuju (S)

Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)

Skor/Nilai 1 : Sangat Setuju (SS)

Catatan : Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun terhadap Bapak/Ibu, karena penelitian ini semata-mata digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.



DAFTAR PERNYATAAN
Penilaian Variabel-variabel Penelitian

A. Variabel Self Assessment System (X_1)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri pada DJP untuk memperoleh NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP.					
2.	Wajib pajak berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang secara lengkap dan benar.					
3.	Wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu.					
4.	Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap.					
5.	Wajib pajak berkewajiban untuk melapor pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.					

B. Variabel Teknologi Informasi Perpajakan (X_2)

No	Pernyataan	Skala interval				
		5				1
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan mendorong wajib pajak taat dalam pelaporan pajaknya.					
2.	Teknologi informasi perpajakan yang memadai akan meminimalkan resiko penghindaran pajak dan penundaan pelaporan pajak.					
3.	Akses informasi yang mudah sehingga mendorong wajib pajak melapor tepat					

	waktunya.					
4.	Wajib pajak banyak yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
5.	Teknologi informasi perpajakan yang ada dalam wujud modernisasi pajak seperti e-filling, e-billing dan e-registration mudah dipelajari sehingga wajib pajak tidak kesulitan.					

C. Variabel Penggelapan Pajak (Y)

No	Pernyataan	Skala interval						
		1	5	SS	S	KS	TS	STS
1.	Wajib pajak tidak mendaftarkan diri pada DJP untuk memperoleh NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP.							
2.	Ketidaksesuaian jumlah nominal yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah yang seharusnya dibayar oleh waib pajak.							
3.	Wajib pajak dalam menyampaikan SPT tidak disertai dengan bukti pembayaran.							
4.	Tidak melampirkan bukti potong pada SPT wajib pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.							
5.	Dalam proses pemeriksaan, wajib pajak senantiasa tidak melampirkan dokumen asli.							

Lampiran 2 : hasil uji spss 24

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penggelapan Pajak	53	20.00	25.00	23.4151	1.36486
Self Assessment System	53	18.00	25.00	23.4151	1.73686
Teknologi Informasi Perpajakan	53	14.00	24.00	19.2453	2.62316
Valid N (listwise)	53				

Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.020	2.580		6.984	.000
	Self Assessment System	.337	.097	.428	3.488	.001
	Teknologi Informasi Perpajakan	-.129	.064	-.248	-2.023	.048
	Moderasi	-.053	.046		-2.719	.0263

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Uji Validitas Self Assesment System

variabel	Indikator	Nilai	Nilai	keterangan
		R _{hitung}	R _{tabel}	
<i>Self assessment system (X1)</i>	X1.1	0,296	0,2241	Valid
	X1.2	0,564	0,2241	Valid
	X1.3	0,682	0,2241	Valid
	X1.4	0,579	0,2241	Valid
	X1.5	0,608	0,2241	Valid

Uji Validitas Teknologi Informasi Perpajakan

variabel	Indikator	Nilai	Nilai	keterangan
		R_{hitung}	R_{tabel}	
Teknologi informasi perpajakan (X2)	X2.1	0,497	0,2241	Valid
	X2.2	0,489	0,2241	Valid
	X2.3	0,516	0,2241	Valid
	X2.4	0,536	0,2241	Valid
	X2.5	0,543	0,2241	Valid

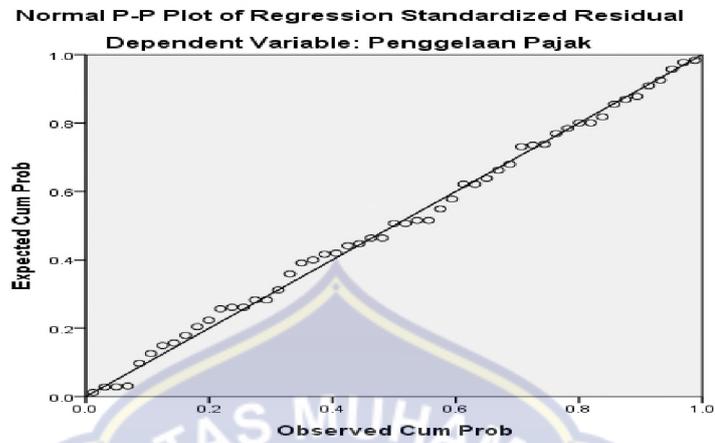
Uji Validitas Penggelapan Pajak

variabel	Indikator	Nilai	Nilai	keterangan
		R_{hitung}	R_{tabel}	
Penggelapan pajak (Y)	Y.1	0,591	0,2241	Valid
	Y.2	0,526	0,2241	Valid
	Y.3	0,532	0,2241	Valid
	Y.4	0,630	0,2241	Valid
	Y.5	0,596	0,2241	Valid

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's <i>Alpha</i>	N Of Items	keterangan
Self assessment system	0,708	5	Reliabel
Teknologi informasi perpajakan	0,672	5	Reliabel
Penggelapan pajak	0,718	5	Reliabel

Uji Normalitas Data



Non Parametric one sample kolmogrov smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.18539829
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.049
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
<p>a. Test distribution is Normal.</p> <p>b. Calculated from data.</p> <p>c. Lilliefors Significance Correction.</p> <p>d. This is a lower bound of the true significance.</p>		

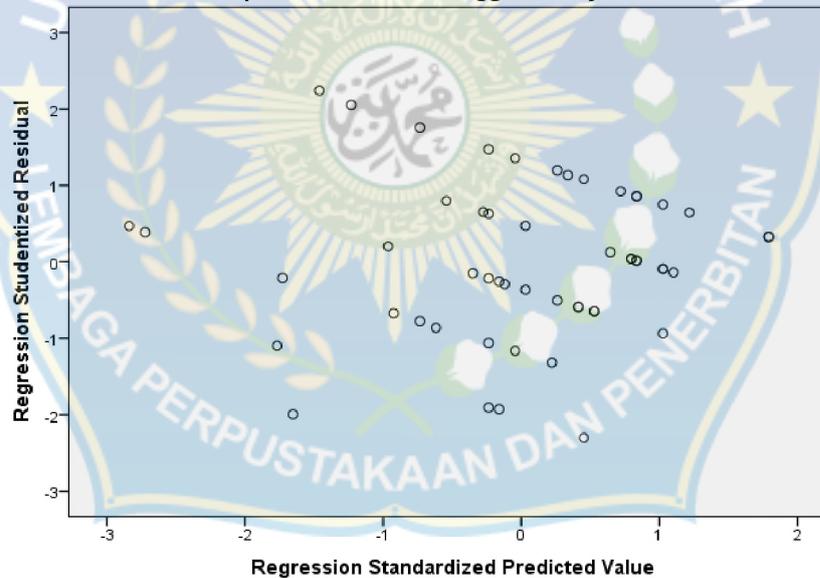
Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 SAS	1.000	1.000
1 TIP	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PP

Scatterplot

Dependent Variable: Penggelan Pajak



Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.515 ^a	.265	.220	1.20550	1.924

a. Predictors: (Constant), moderasi, self assessment system, teknologi informasi prerpajakan

b. Dependent Variable: penggelan pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.660	3	8.553	5.886	.002 ^b
	Residual	71.208	49	1.453		
	Total	96.868	52			

a. Dependent Variable: penggelapan pajak

b. Predictors: (Constant), moderasi , self assessment system, teknologi informasi perpajakan

Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.020	2.580		6.984	.000
	Self Assessment System	.337	.097	.428	3.488	.001
	Teknologi Informasi Perpajakan	-.129	.064	-.248	-2.023	.048
	Moderasi	-.053	.046	-.2719	-1.132	.263.

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Risma, lahir pada tanggal 23 Mei 1997 di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Anak kedua dari pasangan Kardi dan Nur Ema. Memasuki jenjang pendidikan formal di SD Negeri 10 Sebatik pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sebatik Tengah dan tamat pada tahun 2012. Kemudian tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Sebatik Tengah dan tamat pada tahun 2015. Penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada program Strata Satu (S1).

